

Pengelolaan BantuanLangsung Tunai Dana Desa Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo

Ari Yopi Ispa¹, Astuti Prihatiningsih², Teti Marlina³

¹Institut Agama Islam Tebo, ariyopi06@gmail.com

²Institut Agama Islam Tebo, astutiprihatiningsih86@gmail.com

³Institut Agama Islam Tebo, marlinateti622@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has spread throughout the world and significantly impacted the people's economy. The government initiated a village fund direct cash assistance (BLT-DD) program to help poor rural communities affected by COVID-19. Transparency in The planning, distribution, and reporting of this program is urgently needed. In addition, accountability must be carried out clearly so that there is no misappropriation or embezzlement of funds. This study aims to analyze the effect of transparency and accountability on the management of Village Fund Direct Cash Assistance. This study uses primary data obtained from the direct distribution of questionnaires. The method used in this study is quantitative and uses multiple linear regression analysis. Respondents in this study were village officials and aid recipients in Bedaro Rampak Village, totaling 32 people. The result of this study indicates that the transparency variable has a significant and positive effect on the BLT-DD management variable. The accountability variable also has a significant and positive effect on the BLT-DD management variable. The results of the t-count value of 12.557 and the t-table value of 3.327 indicate that transparency and accountability have an effect on the management of the BLT village fund in Bedaro Rampak Village, Tebo Centre District.

Keyword: Village Fund Management, BLT Village Fund

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, pemerintah sampai saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan masalah ini. Kondisi kemiskinan semakin meningkat sejak Indonesia diterjang krisis ekonomi akibat dari Virus Covid 19 yang mulai terjadi dari Tahun 2020. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan atau mengurangi angka kemiskinan. Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, namun tidak sedikit penduduknya tergolong miskin. Beberapa program yang dilakukan pemerintah belum menekan angka kemiskinan yang signifikan. Salah satu kondisi yang memprihatinkan di Indonesia yaitu semakin tingginya peningkatan kepadatan penduduk namun, tidak diimbangi dengan adanya peningkatan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Dampak pandemi covid-19 yang terjadi diseluruh dunia saat ini mempengaruhi dalam

menghadapi berbagai tantangan ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merancang serangkaian kebijakan strategis guna meredam dampaknya terhadap kelompok rentan. Melalui kewenangannya, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan seperti Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari respons awal krisis. Di samping itu, program Kartu Prakerja diluncurkan untuk mendukung pencari kerja melalui pelatihan dan insentif finansial. Pemerintah juga memberikan subsidi listrik dan bantuan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk intervensi berbasis desa yang turut diimplementasikan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang bersumber dari alokasi dana desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan instrumen jaminan sosial berbasis komunitas yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada warga desa yang terdampak secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Program ini menjadi prioritas utama dalam struktur penganggaran Dana Desa, di mana sebagian alokasi anggaran secara khusus ditujukan untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan. Proses validasi dan penetapan data penerima dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), yang melibatkan elemen strategis desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, tim relawan COVID-19, serta tokoh masyarakat, guna memastikan inklusivitas dan akurasi data. Musdesus juga berperan dalam merumuskan kriteria sasaran dan sinkronisasi program bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program seperti PKH, BPNT, maupun Kartu Prakerja. Prioritas diberikan kepada rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi oleh skema bantuan lainnya, dan jumlah penerima ditentukan berdasarkan urgensi dan kelayakan yang diukur dari kondisi sosial-ekonomi terkini.

Tata kelola pendistribusian BLT Dana Desa diatur sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), termasuk dalam hal mekanisme pendataan, verifikasi penerima manfaat, dan implementasi penyalurannya. Proses pendataan dilakukan oleh relawan desa atau gugus tugas COVID-19 yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, dengan basis pelacakan data dimulai dari tingkat RT, RW, hingga desa. Anggaran BLT-DD dialokasikan dalam struktur APBDes dengan proporsi berdasarkan jumlah dana desa yang diterima: desa dengan dana di bawah Rp800 juta dapat mengalokasikan hingga 25%; dana antara Rp800 juta–Rp1,2 miliar maksimal 30%; dan desa yang menerima lebih dari Rp1,2 miliar dapat mengalokasikan hingga 35%. Jika jumlah penerima melebihi kapasitas anggaran, desa dapat melakukan penyesuaian tambahan alokasi, namun tetap harus melalui persetujuan dari pemerintah kabupaten atau kota. (Ombudsman.go.id).

Pengelolaan adalah proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya—termasuk tim dan aset—dengan tujuan memastikan organisasi berjalan optimal dan mencapai target yang telah disetujui secara efektif dan efisien. (Afifuddin, 2010). Pengelolaan BLT-DD bisa dinilai berhasil ketika pemerintah desa mampu menjalankan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku. Esensinya, pengelolaan ini harus berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang penerima manfaat, jumlah bantuan, serta alokasi dana. Sedangkan akuntabilitas (keterbukaan) menurut (evi triana; adi rahaman, 2020) kurang

diiperhatikan sedangkan menurut (Komariya et al., 2023) transparansi mempengaruhi Pengelolaan BLT dana desa.

Penyaluran BLT-DD di lapangan masih kerap mengalami masalah ketidaktepatan sasaran, di mana banyak warga yang berhak tidak memperoleh bantuan. Di Aceh, Kepala (Kusmyati, 2019) Ombudsman, Taqwaddin, bersama timnya menemukan bahwa distribusi dana bansos dan BLT-DD sering terlambat dan minim transparansi informasi kepada penerima, sehingga menyebabkan bantuan tidak sampai kepada yang seharusnya (www.kanalaceh.com). Sayangnya, BLT-DD yang seharusnya jadi bantuan nyata untuk meringankan beban masyarakat malah berujung pada berbagai polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan akses terhadap informasi penting dan relevan mengenai pengelolaan sumber daya publik, yang disediakan secara jelas kepada pemangku kepentingan dan pihak yang membutuhkan, guna mendorong akuntabilitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. (Mahmudi, 2021). Transparansi merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan yang memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi terkait proses perumusan kebijakan, pelaksanaannya, hingga hasil yang dicapai, guna mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara Negara (Iznillah et al., 2018). Adapun manfaat transparansi menurut (Andrianto, 2007) sebagai berikut:

1. Mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi
2. Memudahkan dalam mengenali kekuatan dan kelemahan dari suatu kebijakan;
3. Mendorong peningkatan akuntabilitas lembaga sehingga kinerjanya dapat diukur secara terbuka oleh publik;
4. Membangun kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam menetapkan keputusan kebijakan;
5. Memperkuat kohesi sosial melalui meningkatkannya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
6. Membuat iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kepastian dalam dunia usaha

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau pimpinan organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas yang efektif membutuhkan sistem akuntansi yang mampu menyajikan data secara akurat, andal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi. (Sri Lestari & Roy Valiant Salomo, 2022)

Astuty mengungkapkan (Sumpeno, 2011) Melibatkan kapasitas Aparatur desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengerjaan kegiatan yang terkait dengan pembangunan dan tata kelola desa. Fokus masalah terletak pada aspek keuangan, khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Desa (DD) beserta seluruh komponennya..

Akuntabilitas menjadi prinsip kunci dalam mencerminkan kepuasan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak yang berintegritas untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam pengelolaan BLT-DD, akuntabilitas mendorong perangkat desa mengikuti alur pengelolaan yang sistematis—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tingkat keberhasilan akuntabilitas dapat dinilai dari konsistensi dan ketertiban dalam menjalankan setiap tahapan tersebut menurut (Prof. Dr. Sedarmayanti, 2013) yaitu sebagai berikut:

1. Memikul tanggung jawab atas setiap kelalaiann dalam pelayanan
2. Mengimplementasikan tata cara dan mekanisme operasional organisasi secara efektif
3. Prioritaskan peneydiaan layanan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan warga

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

BLT-DD merupakan bentuk bantuan tunai yang bersumber dari dana desa dan ditujukan kepada masyarakat miskin serta kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya akibat dampak pandemi COVID-19 (KOMPAK, 2020). Aparatur desa diwajibkan untuk melaksanakan program ini sebagai bagian dari strategi penanganan pandemi sesuai ketentuan PMK No. 40/PMK.07/2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 terkait prosedur Pembagian dan Persetujuan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bireuen, penerima BLT-DD merupakan warga yang menetap di desa setempat dan tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, maupun bantuan dari program pemerintah lainnya

Pengelolaan BLT-DD ini sama halnya seperti pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, menurut (Fitriani et al., 2022) yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana
2. Implementasi kegiatan
3. Pengelolaan administrasi
4. Penyusunan laporan
5. Penyerahan pertanggung jawaban

Desa yang tidak menyalurkan BLT-DD akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020, perubahan dari PMK No. 205/2019, khususnya pasal 47A yang mewajibkan pelaksanaan BLT-DD oleh pemerintah desa. Sanksi tersebut berupa:

1. Distribusi anggaran keuangan desa untuk tahap III pada tahun berjalan akan disetop
2. Pemerintah desa yang berstatus Mandiri akan dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% dari keuangan desa tahap II pada tahun anggaran yang sama.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Riset ini dilakukan dengan model kuantitatif, yang fokus pada analisis populasi atau sampel. Metode ini dipilih karena data yang digunakan berupa angka atau skala numerik untuk mengkaji hubungan antar variabel (Mudrajad Kuncoro, 2013) Riset ini bertujuan untuk

mengetahui Pengelolaan BLT-DD di desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah dipengaruhi Transparansi dan Akuntabilitas

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan area yang mencakup subjek dan objek dengan sifat dan karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh periset untuk disimak dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan (Uma Sekaran, 2017). Sampel adalah sebagian dari populasi yang mencerminkan karakteristiknya. Jika populasi terlalu besar untuk diteliti secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran, tenaga, dan waktu, peneliti memilih sampel sebagai representasi yang mewakili populasi untuk dianalisis lebih lanjut. (Sugiyono, 2016).

Riset ini menerapkan metode sensus dengan melibatkan seluruh populasi sebagai sampel data. Tujuan populasi pada riset ini merupakan perangkat Desa dan penerima bantuan di Desa Bedaro Rampak sebanyak 32 responden.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Riset ini mengandalkan data pokok yang diperoleh langsung dari responden melalui distribusi kuesioner terkait pengelolaan BLT-DD di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner untuk mencapai tujuan informasi langsung dari para partisipan.

Metode Analisis Data

Analisis regresi linear berganda diterapkan untuk mengukur pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas kepada variabel terikat (Ghozali & Ratmono, 2017). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + Q_1x_1 + Q_2x_2 + s$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- α = Konstanta
- X_1 = Transparansi
- X_2 = Akuntabilitas
- $\beta_{1,2}$ = Koefesien regresi variabel X
- ε = Error

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas adalah proses pengujian instrumen data untuk menentukan sejauh mana alat ukur tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan tepat dan sesuai dengan variabel yang ingin diukur. Scoring validitas yang digunakan dalam riset ini menggunakan program komputer statistic yaitu IBM SPSS. Penguji memakai standar 0,05. Dengan kata lain, data

dinyatakan valid apabila menunjukkan korelasi signifikan dengan skor total, yaitu ketika nilai R_{hitung} lebih besar dari nilai R_{tabel}

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	R Hitung	R Tabel	Hasil
Transparansi	X1.1	0.528	0.349	diterima
	X1.2	0.712	0.349	diterima
	X1.3	0.485	0.349	diterima
	X1.4	0.434	0.349	diterima
	X1.5	0.458	0.349	diterima
	X1.6	0.528	0.349	diterima
	X1.7	0.789	0.349	diterima
	X1.8	0.722	0.349	diterima
Akuntabilitas	X2.1	0.720	0.349	diterima
	X2.2	0.672	0.349	diterima
	X2.3	0.690	0.349	diterima
	X2.4	0.480	0.349	diterima
	X2.5	0.551	0.349	diterima
	X2.6	0.497	0.349	diterima
	X2.7	0.672	0.349	diterima
	X2.8	0.703	0.349	diterima
	X2.9	0.768	0.349	diterima
Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Y1	0.656	0.349	diterima
	Y2	0.558	0.349	diterima
	Y3	0.734	0.349	diterima
	Y4	0.487	0.349	diterima
	Y5	0.739	0.349	diterima
	Y6	0.426	0.349	diterima
	Y7	0.428	0.349	diterima
	Y8	0.442	0.349	diterima
	Y9	0.375	0.349	diterima
	Y10	0.528	0.349	diterima

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Uji Reabilitas

Model pengujian reliabilitas kuesioner dalam riset dengan menerapkan rumus Cronbach's Alpha. Suatu indikator dianggap reliabel apabila angka Cronbach's Alpha lebih dari 0,6; sebaliknya, apabila nilainya di bawah 0,6, dengan demikian indikator tersebut dinyatakan non reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0.732	Reliabel
X2	0.819	Reliabel
Y	0.727	Reliabel

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Analisis Data

Analisis data pada Riset ini dilakukan menerapkan regresi linier berganda yang diolah melalui software SPSS versi 29. Hasil regresi kemudian disajikan dalam bentuk persamaan matematis.

Tabel 3. Persamaan Linier Berganda coefficients^a

Model	Unstan darize d B	Coeffi cients Std. Error	Stand a rdize d Coeffi cients Beta	T	Sig.	Collin earity Tolera nce	Statisti cs VIF
1 (Constant)	11.426	6.382		1.790	.084		
Transparansi	.341	.116	.398	2.926	.007	.1000	1.000
akuntabilitas	.511	.126	.552	4.059	<.001	.1000	1.000

Dependent Variabel: Pengelolaan_BLT_DD

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Dari table diatas dapat disimpulkan persamaan regresi yaitu:

$$Y = 11,426 + 0,341X_1 + 0,511X_2.$$

Output dari persamaan regresi linier tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

- Angka konstanta (α) = 11,426 adalah positif. Dengan demikian variabel transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) Angkanya 0, maka pengelolaan BLT-DD (Y) nilainya 11,426.
- Koefisien regresi pada transparansi (X_1) memiliki pengaruh kepada pengelolaan BLT-DD (Y) sebesar 0,341. Jika variabel transparansi menaik dengan asumsi variabel akuntabilitas tetap, dengan demikian pengelolaan BLT-DD sebesar 0,341.
- Koefisien regresi pada akuntabilitas (X_2) memiliki pengaruh kepada pengelolaan BLT-DD (Y) sebesar 0,511. Jika variabel akuntabilitas meningkat dengan asumsi variabel transparansi tetap, dengan pengelolaan BLT-DD sebesar 0,511.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data riset terdistribusi secara

normal. Pengujian ini dilakukan model Kolmogorov-Smirnov, dengan indikator bahwa data dianggap normal jika angka signifikansi lebih dari 0,05, dan tidak normal jika angka tersebut di bawah 0,05. Pedoman pengujian normalitas menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05

Apabila angka signifikansi (sig) lebih besar dari alfa (α), maka sampel dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, jika sig lebih kecil dari α , sampel dianggap tidak berasal dari populasi dengan distribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

			Unstandard ized Residuan
N			32
Normal Paramters	mean		-.0105974
	std, deviation		1.03083770
Most estreme differences	oluteabs		.113
	positve		.066
	negative		-.113
tes statistik			.113
asyp, sig 2 tailed			.368d
monte carlo sig, 2 tailed	sig,		.356
	99% Coffince interval	lower bound	.356
		upper bound	.381

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Bersumber tabel tersebut, Angka Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,20, melebihi batas alpha 0,05, mengindikasikan bahwa semua variabel berdistribusi normal dan data siap untuk diuji lebih lanjut.

Uji Multikolineritas

Uji *multikolineritas* dilakukan untuk menemukan suatu korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Apabila korelasi tersebut ditemukan, maka model mengalami masalah multikolineritas yang perlu diperbaiki. (Ghozali & Ratmono, 2017). Dalam riset ini, multikolineritas diuji menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Setiap variabel dievaluasi berdasarkan angka VIF, jika angka $VIF \leq 10$ menginformasikan tidak adanya *multikolineritas*, sementara nilai $VIF > 10$ mengindikasikan adanya masalah multikolineritas (Yudiatmaja, 2013)

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinier

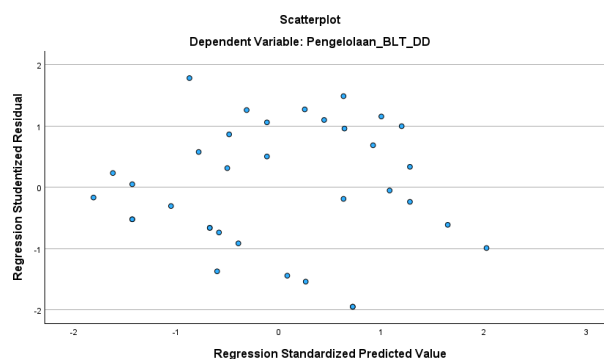
Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Kriteria
X1	1,00	1,00	Non Multikol
X2	1,00	1,00	Non Multikol

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Bersumber tabel diatas, diperoleh angka signifikasi VIF sebesar 1,000 lebih kecil dari 10, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel tidak terjadi multikolinier yang artinya layak untuk dilanjutkan kepengujian Selanjutnya.

Uji Heteroskedasitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk mengecek apakah varians residu dalam bentuk regresi berbeda antar pengamatan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan visualisasi grafik di SPSS. Deteksi *heteroskedastisitas* dilakukan dengan mengamati pola pada grafik, khususnya jika titik-titik data membentuk dua garis lurus. Pada grafik tersebut, sumbu X menunjukkan nilai prediksi variabel X, sedangkan sumbu Y merepresentasikan residual (selisih antara angka prediksi Y dan angka aktual Y) (Husein Umar, 2013)

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedasitas

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Bersumber grafik scatterplot tersebut, terlihat bahwa data memposisikan tersebar tidak beraturan di atas dan di bawah nol pada sumbu Y tanpa pola tertentu, menandakan tidak adanya *heteroskedastisitas*.

Pengujian Hepotesis

Uji Statistik t

Ghozali(Ghozali & Ratmono, 2017) mempresentasikan, uji statistik t pada dasarnya mengkonfirmasikan secara individu variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen. Uji ini dilakukan untuk membedakan signifikansi t_{hitung} dengan ketentuan:

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$: H_0 diterima atau H_a ditolak

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_a diterima atau H_0 ditolak

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

coefficients							
Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1 (Constant)	11.426	6.382		1.790	.084		
Transparansi	.341	.116	.398	2.926	.007	.1000	1.000
akuntabilitas	.511	.126	.552	4.059	<.001	.1000	1.000

Dependent Variabel: Pengelolaan_BLT_DD

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan table diatas, capaian analisis data pada uji t sebagai berikut:

1. Angka t_{hitung} untuk variabel transparansi (X1) sebesar 2,926 yang berarti lebih besar dari angka t_{tabel} 2,045, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pengelolaan BLT-DD desa dipengaruhi oleh Transparansi
2. Nilai t_{hitung} untuk variable akuntabilitas (X1) sebesar 4.059 yang berarti lebih besar dari angka t_{tabel} 2.045, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengelolaan BLT-DD dipengaruhi oleh akuntabilitas.

Uji Statistik F

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD (Y). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi f_{hitung} dengan ketentuan:

Apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$: H_0 diterima atau H_a ditolak

Apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$: H_a diterima atau H_0 ditolak

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Bentuk		sum of squares	df	Mean Square	f	sig,
1	Regression	89.589	2	44.795	12.577	<.001 ^b
	Residual	103.286	29	3.562		
	Total	192.875	31			

(Sumber : Data Primer Yang diolah tahun 2024)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) melihat besar kecilnya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) Digunakan untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas berkontribusi terhadap pengelolaan BLT-DD di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.464	.428	1.887

(Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2024)

Bersumber pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.42, maka hal ini variabel X1 dan X2 berpengaruh sebesar 42% kepada variabel Y.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dipengaruhi Transparansi

Pengaruh setiap variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) kepada variabel dependen (pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa) dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi kepada Pengelolaan BLT-DD. Hasil analisis parsial menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,926, sementara nilai t_{tabel} adalah 2,045. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka capaian ini dapat diterima dan menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima.

Hasil riset ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh (M. Daud et al., 2022) Transparansi (X1) terbukti memberikan dampak positif kepada pengelolaan BLT-DD (Y). Kemudahan akses informasi mengenai pengelolaan bantuan ini sangat krusial bagi masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagai prinsip utama, transparansi memastikan masyarakat dapat dengan bebas mengakses data terkait kebijakan, proses, dan pengelolaan keuangan pemerintah. Implementasi transparansi yang efektif mencerminkan kinerja pemerintah yang transparan dan responsif, sekaligus meningkatkan kepercayaan serta kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan..

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dipengaruhi Akuntabilitas

Bersumber pada hasil dari penelitian secara parsial menunjukan bahwa angka t_{hitung} sebesar 4.059 dan angka t_{tabel} 2,045. Nilai t_{hitung} lebih besar dari angka t_{tabel} , dimana berarti angka tersebut dapat diterima karena angka t_{hitung} lebih besar dari angka t_{tabel} . Artinya akuntabilitas berpengaruh secara signifikan kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Oleh sebab itu dapat direkomendasikan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Capaian riset ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Adrianti et al., 2023) yang menginformasikan bahwa akuntabilitas (X2) berpengaruh positif kepada pengelolaan

BLT-DD (Y). akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, adanya akuntabilitas akan menjadi bukti keberhasilan dalam pengelolaan BLT-DD.

Temuan Riset ini mendukung teori stewardship, yang menekankan pemberian kepercayaan kepada pihak principal. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah sebagai steward bertanggung jawab mengelola keuangan secara efektif untuk mewujudkan visi dan misinya. Dengan demikian, baik pemerintah sebagai steward maupun masyarakat sebagai principal akan semakin termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dibandingkan melakukan tindakan yang menyimpang atau bersifat egois.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban aktivitas dan kinerja keuangan yang dikerjakan oleh pemerintah, dengan akuntabilitas yang memiliki pengaruh kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang ada di Desa Pulung Rejo. Hal serupa tercapainya indikator tujuan dari akuntabilitas sendiri. Dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah masyarakat menjadi percaya dan yakin terhadap kinerja pemerintah yang sudah sepadan dan dapat dirasa efektif dalam pengelolaannya sehingga mempresentasikan kepuasan masyarakat.

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bersumber hasil riset secara simultan menunjukkan bahwa angka t_{hitung} sebesar 12,557 dan angka t_{tabel} 3,327. Angka tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari angka t_{tabel} , dimana berarti angka tersebut dapat diterima karena angka t_{hitung} dari suatu t_{tabel} lebih besar. Artinya transparansi berpengaruh secara signifikan kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Capaian riset ini sesuai dengan penelitian yang dikerjakan oleh (M. Daud et al., 2022) yang menyatakan bahwa transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif kepada Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y).

SIMPULAN

Bersumber dari capaian riset dan pembahasan diatas dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Bersumber dari capaian riset secara parsial menunjukkan bahwa angka t_{hitung} sebesar 2,926 dan angka t_{tabel} 2,045. Angka tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , dimana berarti angka tersebut dapat diterima karena angka t_{hitung} dari suatu t_{tabel} lebih besar. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Capaian riset ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. Daud et al., 2022) yang menyatakan bahwa transparansi (X_1) berpengaruh positif terhadap positif Kepada Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y). transparansi atau kebebasan untuk mengakses dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa sangat penting kepada masyarakat. Adanya transparansi akan menjadi bukti keberhasilan dari pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat.
- b. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Bersumber dari capaian riset secara parsial menunjukkan bahwa angka

t_{hitung} sebesar 4.059 dan angka t_{tabel} 2,045. Nilai t_{hitung} lebih besar dari angka t_{tabel} , dimana berarti nilai tersebut dapat diterima karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Pengaruh positif dan signifikan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Capaian riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh (Adrianti et al., 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (Y). Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Capaian riset ini sejalan dengan teori *stewardship*, yang menekankan pentingnya kepercayaan dari *principal*. Dalam kerangka teori tersebut, pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mewujudkan visi dan misinya. Dengan demikian, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai *principal* semakin terdorong untuk menjalankan peran mereka dengan integritas, menghindari tindakan menyimpang, dan mengutamakan kepentingan bersama.

- c. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Berdasarkan capaian riset secara simultan mempersentasikan bahwa angka t_{hitung} sebesar 12,557 dan angka t_{tabel} 3,327. Angka tersebut mempersentasikan bahwa t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , dimana berarti angka tersebut dapat diterima karena angka t_{hitung} dari suatu t_{tabel} lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memenuhi tanggungjawab kepada pengelolaan bantuan langsung tunai dan masyarakat pun ikut aktif dalam mengawasi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Capaian riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh (M. Daud et al., 2022) yang menyatakan bahwa transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y).

REKOMENDASI

Bagi pemerintah desa setempat untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, sehingga masyarakat dapat terus percaya terhadap kinerja aparat desa dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Masyarakat desa diharapkan untuk terus ikut mengawasi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa agar tidak terjadi kecurangan yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa. *Income Journal.*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.61911/income.v2i1.29>
- Afifuddin. (2010). *Manajemen sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- evi triana; adi rahaman. (2020). Jieb : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5(November), 1–12. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

- Fitriani, A. S., Iriani, N. I., & Dwi Susanti, R. A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 203–212. <https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.3030>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisi Multivariat dan Ekonometrika (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10)* (A. Tejokusumo (ed.); 2nd ed.). Undip.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Komariya, B., Indah Handayani, Y., & Ilmi, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Kecamatan Pakusari Jember. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 22–38. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v4i2.961>
- Kusmyati, S. A. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return On Asset (Roa), Non Performing Finance (Npf) terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017. In *Prosiding Ilmu Ekonomi* (Vol. 5, Issue 1).
- M. Daud, R., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (revisi). UII Press.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis* (1st ed.). erlangga.
- Prof. Dr. Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama.
- Sri Lestari, & Roy Valiant Salomo. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung:Alfabeta. In *Bandung:Alfabeta*.
- Uma Sekaran, R. B. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Yudiaatmaja, F. (2013). *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik*. Gramedia Pustaka Utama.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=2>